

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

2.1.1.1 Pengertian Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Secara teoretis, pengembangan kompetensi profesional guru berpijak pada teori *Community of Practice* yang dikemukakan oleh Etienne Wenger (1998), yang memandang pembelajaran profesional sebagai proses sosial melalui partisipasi aktif dalam komunitas dengan domain keahlian yang sama, interaksi berkelanjutan, dan praktik bersama (*shared practice*). Dalam komunitas praktik, kompetensi profesional berkembang melalui berbagi pengalaman, dialog reflektif, negosiasi makna, dan pembelajaran berbasis praktik nyata secara kontekstual dan berkelanjutan. *Community of Practice* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu domain sebagai bidang keahlian bersama, community sebagai hubungan dan interaksi sosial antaranggota, serta practice sebagai praktik, pengalaman, dan pengetahuan yang dibagikan dan dikembangkan bersama, yang secara terpadu membentuk pembelajaran profesional yang bermakna.

Dalam konteks pendidikan, konsep komunitas praktik tersebut terwujud dalam berbagai wadah profesional guru, salah satunya adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). MGMP dapat dipahami sebagai komunitas praktik guru mata pelajaran, di mana guru-guru yang memiliki domain keahlian yang sama berkumpul secara terstruktur untuk saling berinteraksi, berdiskusi, berbagi praktik pembelajaran, serta merefleksikan pengalaman profesional mereka. Melalui

MGMP, guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai pembelajar profesional yang secara aktif membangun dan memperbarui kompetensi pedagogik dan profesionalnya.

Secara normatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa MGMP merupakan wadah profesional guru mata pelajaran yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, serta memecahkan berbagai permasalahan pembelajaran secara kolektif (Kemendikbud, 2016: 3–4). Definisi ini sejalan dengan pandangan *Community of Practice* yang menekankan pentingnya kolaborasi dan pembelajaran berbasis komunitas dalam pengembangan profesional guru.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) yang menyatakan bahwa MGMP merupakan komunitas belajar guru yang menekankan kegiatan berbagi praktik baik (*best practices*), pengembangan perangkat pembelajaran, serta refleksi dan evaluasi pembelajaran sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan (Ditjen GTK, 2017: 7–8). Hal ini menunjukkan bahwa MGMP berfungsi sebagai ruang pembelajaran kolektif yang konsisten dengan prinsip *learning as social participation* sebagaimana dikemukakan oleh Wenger.

Secara akademik, Muslich (2011: 84–86) memandang MGMP sebagai forum kolektif guru yang menyediakan ruang diskusi dan pemecahan masalah pembelajaran secara kolaboratif, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pengajaran. Sejalan dengan itu, Mulyasa (2013: 187–189) menempatkan MGMP sebagai organisasi profesi guru yang berperan dalam pembinaan dan

pengembangan kompetensi profesional secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pandangan ini menegaskan bahwa MGMP bukan sekadar forum administratif, melainkan wadah pengembangan profesional yang berorientasi pada praktik nyata pembelajaran.

Lebih lanjut, Suyanto dan Asep Jihad (2013: 142–144) menyatakan bahwa MGMP merupakan bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan (*continuous professional development/PKB*) yang dilaksanakan melalui forum diskusi terstruktur, kolaborasi antarguru, serta refleksi terhadap praktik pembelajaran. Pendapat ini menguatkan posisi MGMP sebagai komunitas praktik yang memungkinkan terjadinya pembelajaran profesional secara berkesinambungan.

Dari sisi implementatif, Daryanto (2013: 96–98) menekankan bahwa MGMP berfungsi sebagai wadah formal guru mata pelajaran untuk bekerja sama meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pelatihan, lokakarya, dan pengembangan perangkat ajar seperti RPP, modul, dan LKPD. Sementara itu, Sudjana (2008: 15–17) menegaskan bahwa MGMP berperan membantu guru dalam meningkatkan kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta menindaklanjuti pembelajaran secara sistematis.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, MGMP dapat disimpulkan sebagai komunitas praktik profesional guru mata pelajaran yang berfungsi sebagai ruang pembelajaran kolektif untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional secara berkelanjutan melalui kolaborasi, refleksi, pengembangan perangkat pembelajaran, serta pemecahan masalah pembelajaran. Dengan

demikian, MGMP selaras dengan grand teori *Community of Practice* dan berperan strategis dalam pengembangan profesional guru berbasis komunitas.

Pengertian MGMP selanjutnya dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pengertian (MGMP) Menurut Lembaga dan Para Ahli

No	Sumber/ Tokoh	Pengertian MGMP	Fokus Utama/ Kata kunci
1	Kemendikbud (2016: 3–4)	MGMP adalah wadah profesional guru mata pelajaran sejenis untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan mutu pembelajaran, dan memecahkan masalah pembelajaran secara kolektif	Pengembangan kompetensi, mutu pembelajaran, pemecahan masalah
2	Dirjen GTK (2017: 7–8)	MGMP adalah komunitas belajar guru untuk meningkatkan profesionalisme, berbagi praktik baik, mengembangkan perangkat pembelajaran, serta melakukan refleksi dan evaluasi.	Komunitas belajar, profesionalisme, praktik baik, refleksi
3	Muslich (2011: 84–86)	MGMP merupakan forum kolektif guru untuk berdiskusi, memecahkan masalah pembelajaran, dan meningkatkan kualitas pengajaran; berfungsi sebagai sarana <i>collaborative learning</i> .	Diskusi, pemecahan masalah, <i>collaborative learning</i>
4	Mulyasa (2013: 187–189)	MGMP adalah organisasi profesi guru yang bertugas memberikan pembinaan, meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, serta memfasilitasi perencanaan dan evaluasi pembelajaran.	Pembinaan, kompetensi pedagogik & profesional, fasilitasi pembelajaran
5	Suyanto & Jihad (2013: 142-144)	MGMP merupakan wadah pengembangan profesional berkelanjutan (PKB) melalui forum diskusi terstruktur.	PKB, diskusi terstruktur
6	Daryanto (2013: 96-98)	MGMP adalah wadah formal guru yang bekerja sama meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pelatihan, <i>workshop</i> , dan pengembangan perangkat ajar.	Pelatihan, <i>workshop</i> , perangkat ajar

7	Sudjana (2008: 15-17)	MGMP merupakan komunitas profesional yang membantu guru meningkatkan kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti pembelajaran.	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut
---	-----------------------	--	---

2.1.1.2 Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan wadah profesional guru yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru secara berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan profesi pendidikan di Indonesia, MGMP tidak hanya berfungsi sebagai forum pertemuan rutin, tetapi juga sebagai komunitas pembelajaran profesional yang memfasilitasi guru dalam memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan pedagogik, dan memperkuat identitas profesionalnya.

Menurut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK (2017: 7–9) serta pendapat Suyanto dan Suyanto & Jihad (2013: 142–145), MGMP memiliki peran utama dalam mendukung Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB). Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, *workshop*, diskusi, refleksi praktik pembelajaran, dan *lesson study*, MGMP menjadi wahana pembinaan profesional yang sistematis. Guru memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara terarah. Peran ini menegaskan bahwa MGMP tidak hanya sekadar forum pertemuan, tetapi merupakan sebuah sistem yang mendorong perbaikan kualitas guru melalui pembinaan profesional berkelanjutan.

Selain itu, Muslich (2011: 84–87) menegaskan bahwa MGMP berfungsi sebagai forum kolaboratif untuk berdiskusi dan memecahkan masalah

pembelajaran. Forum ini memberikan ruang bagi guru untuk membahas berbagai tantangan pembelajaran di kelas, berbagi pengalaman, serta menemukan solusi inovatif secara kolektif. Pendekatan kolaboratif ini membangun budaya saling belajar antar guru (*peer learning*), sehingga praktik pembelajaran yang lebih baik dapat dihasilkan dan disebarluaskan. Dengan demikian, MGMP berperan penting sebagai wadah kolaborasi profesional yang memperkuat kemampuan guru dalam menghadapi kendala pembelajaran di sekolah masing-masing.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) (2016: 3–5) juga menempatkan MGMP sebagai sarana strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan menjamin konsistensi penerapan kurikulum pada mata pelajaran tertentu. Melalui kegiatan MGMP, guru dapat menyelaraskan perangkat ajar, standar penilaian, strategi pembelajaran, serta pendekatan penguatan karakter. Kesamaan pemahaman tersebut berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dengan demikian, MGMP berperan dalam memastikan kualitas pembelajaran menjadi lebih efisien, efektif, dan terukur sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Dalam kedudukannya sebagai organisasi profesi, Mulyasa (2013: 187–190). menjelaskan bahwa MGMP berperan membina guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. MGMP memperkuat hubungan profesional antarguru sehingga terbentuk jejaring kerja yang mampu meningkatkan kapasitas individu maupun kolektif. Melalui kegiatan yang terstruktur, MGMP membantu guru mengembangkan perangkat ajar seperti modul ajar, RPP, LKPD,

instrumen penilaian, media pembelajaran, serta berbagai inovasi lainnya. Peran ini menjadikan MGMP sebagai pusat pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru.

Daryanto (2013: 96–99).menambahkan bahwa MGMP berperan sebagai penggerak utama dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang berkualitas. Melalui *workshop* penyusunan perangkat ajar, guru dapat menghasilkan perangkat yang sesuai dengan kurikulum terbaru dan kebutuhan peserta didik. MGMP memastikan bahwa perangkat ajar yang digunakan guru memiliki standar yang seragam, relevan, dan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran

Dalam perspektif kompetensi teknis, Sudjana (2008: 15–18). menekankan bahwa MGMP membantu guru meningkatkan kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti pembelajaran. Kegiatan seperti simulasi pembelajaran, penyusunan instrumen penilaian, serta analisis hasil belajar memperkuat kemampuan guru dalam mengelola kelas dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peran ini menunjukkan bahwa MGMP bukan hanya forum diskusi, tetapi komunitas profesional yang memperkuat kemampuan teknis guru pada seluruh tahapan pembelajaran.

Secara keseluruhan, dapat disintesis bahwa MGMP memiliki peran komprehensif sebagai komunitas profesional yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru, penguatan praktik pembelajaran, dan penjagaan mutu pendidikan. MGMP menjadi ruang kolaboratif yang secara sistematis membantu guru menghadapi tantangan pembelajaran, mengembangkan perangkat ajar yang berkualitas, memperbaiki strategi pembelajaran, serta meningkatkan kualitas

peserta didik. Dengan demikian, MGMP merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peningkatan mutu pendidikan nasional.

Tabel 2.2
Teori Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran

No	Aspek Peran MGMP	Penjelasan Teoritis	Sumber/ Ahli
1	Peningkatan Profesionalisme Guru	MGMP sebagai penggerak PKB, meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian melalui diskusi, refleksi, <i>workshop</i> , dan pelatihan.	Ditjen GTK (2017: 7-8); Suyanto & Asep Jihad (2013, 142-145)
2	Forum Kolaborasi dan Pemecahan Masalah	MGMP sebagai wadah berdiskusi, berbagi pengalaman, memecahkan masalah pembelajaran, serta berbagi praktik baik.	Muslich (2011: 84-87)
3	Peningkatan Mutu Pembelajaran	Menyelaraskan strategi pembelajaran, standar penilaian, perangkat ajar, dan penerapan kurikulum; meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.	Kemendikbud (2016: 3-5)
4	Organisasi Profesi Guru	Membina kompetensi guru, memperkuat jejaring profesional, dan meningkatkan kemampuan merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran.	Mulyasa (2013: 96-99)
5	Pengembangan Perangkat Pembelajaran	Menghasilkan RPP, modul ajar, LKPD, instrumen penilaian, dan perangkat pembelajaran lain melalui <i>workshop</i> .	Daryanto (2013: 96-99)
6	Peningkatan Kemampuan Teknis Guru	Meningkatkan kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta menindaklanjuti hasil belajar; memperkuat manajemen kelas.	Sudjana (2008: 15-18)
7	Komunitas Pembelajaran Profesional	Menumbuhkan budaya belajar antar guru (peer learning) melalui aktivitas rutin dan refleksi bersama.	Berbagai ahli pendidikan (sintesis teori MGMP)

2.1.1.3 Indikator Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Penelitian ini berpijak pada Teori Sistem (*General Systems Theory*) yang dikemukakan oleh Bertalanffy (1968: 37–41). Bertalanffy memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka yang tersusun atas komponen-komponen saling terkait dan saling memengaruhi, di mana perubahan pada satu komponen akan berdampak pada keseluruhan sistem. Dalam konteks manajemen pendidikan, pendekatan sistem menekankan pentingnya melihat proses pengelolaan secara utuh, mulai dari *input*, proses, *output*, hingga *outcome* dan *impact*, untuk memahami efektivitas suatu program pendidikan secara komprehensif.

Sejalan dengan perspektif sistem tersebut, teori pengembangan profesional guru yang dikemukakan oleh Guskey (2000: 20–30) dan Guskey (2002: 381–389) menegaskan bahwa efektivitas kegiatan pengembangan profesional—termasuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)—perlu dianalisis melalui tahapan yang sistematis, yaitu proses pelaksanaan kegiatan, hasil langsung (*output*), perubahan kompetensi dan praktik guru (*outcome*), serta dampak jangka panjang (*impact*) terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kerangka ini menempatkan MGMP bukan sekadar sebagai forum administratif, melainkan sebagai sistem pengembangan profesional berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Pertama, indikator proses merupakan penanda apakah kegiatan MGMP berlangsung secara efektif sebagai forum profesional guru. Dalam model Guskey (2002: 384–386) proses merepresentasikan kualitas pelaksanaan kegiatan pengembangan profesional, yang mencakup perencanaan, pelibatan aktif peserta,

relevansi materi, serta dinamika interaksi selama kegiatan berlangsung. Sejalan dengan itu, Wiles (1955: 112–114) menyebutkan bahwa kelompok kerja guru yang baik ditandai oleh adanya interaksi intensif, diskusi yang bermakna, dan kegiatan kolaboratif yang terarah untuk memecahkan masalah pembelajaran. Dalam konteks MGMP, indikator proses tercermin pada keteraturan pertemuan, tingkat partisipasi anggota, keberfungsian forum diskusi, pembagian tugas yang jelas, serta kehadiran fasilitator atau narasumber ahli. Dengan demikian, indikator proses mencerminkan mutu pelaksanaan MGMP, bukan hasil yang dihasilkan.

Kedua, indikator *output* merujuk pada hasil langsung yang diperoleh setelah kegiatan MGMP dilaksanakan. Guskey (2000: 20–22) menjelaskan bahwa *output* pengembangan profesional guru dapat berupa produk atau dokumen pembelajaran yang dihasilkan sebagai bukti konkret terlaksananya kegiatan. Dalam konteks MGMP, Daryanto (2013: 78–81) menegaskan bahwa MGMP berfungsi sebagai wadah profesional untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, produk seperti modul ajar, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, hingga bank soal menjadi indikator *output* yang bersifat nyata dan terukur. *Output* ini menjadi bukti administratif sekaligus akademik bahwa MGMP telah menjalankan fungsi profesionalnya.

Ketiga, indikator *outcome* menggambarkan perubahan pada kompetensi guru setelah mengikuti kegiatan MGMP. Dalam model Guskey (2002: 387–389), *outcome* merujuk pada perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang tercermin dalam praktik pembelajaran di kelas. Sejalan dengan pandangan tersebut,

Sudjana (2004: 45–48) menyatakan bahwa peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru merupakan indikator utama keberhasilan kegiatan pembinaan guru. Guru yang aktif mengikuti MGMP diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap materi pelajaran, strategi pembelajaran, asesmen autentik, serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi. *Outcome* ini berhubungan langsung dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikan hasil MGMP secara kontekstual di kelas.

Keempat, indikator dampak (*impact*) merupakan efek lanjutan dari kegiatan MGMP terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dan terhadap peserta didik. Guskey (2000: 28–30) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan profesional guru pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) (2016: 5–7) menekankan bahwa efektivitas komunitas belajar guru seperti MGMP tercermin dari meningkatnya mutu pembelajaran dan capaian belajar peserta didik. Dampak tersebut dapat berupa meningkatnya minat dan partisipasi belajar siswa, hasil asesmen yang lebih baik, pembelajaran yang lebih variatif dan kontekstual, serta tumbuhnya budaya kolaborasi profesional di sekolah. Dampak ini menunjukkan keberhasilan MGMP dalam jangka panjang sebagai sistem pengembangan profesional guru.

Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis indikator MGMP menurut para ahli, maka indikator-indikator tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel ini dimaksudkan untuk

memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur mengenai persamaan dan perbedaan pandangan para ahli terkait indikator MGMP. Oleh karena itu, uraian mengenai jenis indikator MGMP menurut para ahli disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Jenis Indikator MGMP Menurut Ahli

No	Jenis Indikator	Fokus Pengukuran	Contoh Indikator	Rujukan/Ahli
1	Proses	Bagaimana MGMP dilaksanakan	Kehadiran, partisipasi, kolaborasi, diskusi aktif, frekuensi pertemuan	(Guskey, 2002: 384–386). Wiles (1955: 112–114)
2	<i>Output</i>	Hasil langsung kegiatan MGMP	Modul ajar, ATP, RPP, media ajar, bank soal, bahan ajar	Daryanto (2013, 78-81), Guskey (2000: 20-22)
3	<i>Outcome</i>	Dampak pada kompetensi guru	Kompetensi pedagogik meningkat, profesional meningkat, penggunaan metode baru	Sudjana (2004: 45-48), Guskey (2002: 387-389)
4	<i>Impact/ Dampak</i>	Dampak pada sekolah dan siswa	Pembelajaran lebih efektif, hasil belajar meningkat, budaya kolaborasi kuat	Dirjen GTK (2016: 5-7), Guskey (2000: 28-30)

2.1.1.4 Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan MGMP

Keberhasilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah pengembangan profesional guru sangat ditentukan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Para ahli pendidikan menekankan bahwa efektivitas MGMP tidak hanya bergantung pada keberadaannya sebagai organisasi profesi, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan, iklim kolaboratif, kepemimpinan, serta dukungan lingkungan pendidikan. Berikut ini uraian teoritis yang lebih rinci dan mendalam mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan MGMP menurut berbagai pakar.

a. Komitmen dan Partisipasi Guru

Komitmen dan partisipasi guru merupakan faktor paling mendasar yang menentukan keberhasilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Glickman (2001: 25–27) menegaskan bahwa komunitas pembelajaran profesional hanya dapat berfungsi secara optimal apabila anggotanya memiliki “*collective commitment to learn and work together*”, yaitu komitmen kolektif untuk belajar dan bekerja secara kolaboratif. Dalam konteks MGMP, komitmen tersebut tercermin melalui kesediaan guru untuk terlibat secara konsisten, baik dalam kegiatan rutin, diskusi profesional, maupun agenda pengembangan kompetensi berkelanjutan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran profesional guru bahwa MGMP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wahana strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Partisipasi guru tidak hanya diukur dari kehadiran fisik, namun juga dari kualitas keterlibatan, seperti kemampuan berbagi pengalaman, kesiapan membahas masalah pembelajaran, dan kesungguhan untuk meningkatkan kompetensi. Guru yang aktif berpartisipasi biasanya memiliki motivasi intrinsik untuk berkembang dan memperbaiki mutu pengajaran. Semakin tinggi komitmen dan partisipasi guru, semakin besar pula dampak MGMP terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

b. Kepemimpinan Ketua MGMP dan Fasilitator

Kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam menentukan arah, dinamika, dan efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Hoy dan Miskel (2013: 185–188) menjelaskan bahwa suatu organisasi atau forum

profesional akan berjalan secara efektif apabila dipimpin oleh individu yang mampu membangun komunikasi yang efektif, mengelola struktur kerja secara jelas, serta menciptakan iklim kerja yang kolaboratif dan kondusif. Dalam konteks MGMP, peran ketua dan fasilitator menjadi sangat strategis sebagai penggerak, pengarah, sekaligus pengendali kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Keberhasilan MGMP sangat dipengaruhi oleh kemampuan ketua dalam mengorganisasi kegiatan, memfasilitasi diskusi profesional, mengambil keputusan secara partisipatif, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Hoy dan Miskel (2013: 189–191) menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif ditandai oleh kemampuan pemimpin dalam membangun hubungan interpersonal, mengoordinasikan sumber daya, serta menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Ketua MGMP yang efektif juga mampu menjalin hubungan sinergis dengan sekolah inti, pengawas, dinas pendidikan, serta narasumber eksternal. Kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif tersebut akan mendorong terciptanya MGMP yang dinamis, produktif, dan responsif terhadap kebutuhan pengembangan profesional guru.

c. Dukungan Institusi (Sekolah, Pengawas, dan Dinas Pendidikan)

Dukungan institusi merupakan faktor eksternal yang sangat menentukan keberhasilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Daryanto (2013: 82–84) menegaskan bahwa MGMP tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh institusi pendidikan yang menaunginya, baik dalam aspek kebijakan, administratif, maupun fasilitatif. Sekolah memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi keikutsertaan guru, menyediakan waktu yang memadai

bagi guru untuk mengikuti kegiatan MGMP, serta memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar kegiatan MGMP dapat terlaksana dengan efektif.

Selain dukungan sekolah, peran pengawas sekolah dan dinas pendidikan juga sangat krusial dalam keberlangsungan MGMP. Daryanto (2013: 85–87) menjelaskan bahwa pembinaan guru melalui MGMP akan lebih efektif apabila didukung oleh pendampingan pengawas serta kebijakan dinas pendidikan yang mendorong peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan narasumber ahli, fasilitasi pelatihan dan workshop, serta sinkronisasi program MGMP dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan daerah. Ketika dukungan institusi berjalan secara sinergis, kegiatan MGMP dapat terlaksana secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan. Sebaliknya, MGMP akan sulit berkembang apabila tidak memperoleh dukungan administratif dan struktural yang memadai dari institusi terkait.

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Menurut Robbins (2006: 56–58), ketersediaan sumber daya merupakan salah satu determinan utama efektivitas kerja dalam suatu organisasi. Robbins menegaskan bahwa efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya fisik, finansial, dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sarana dan prasarana menjadi fondasi penting bagi terlaksananya kegiatan profesional guru, khususnya pada era pembelajaran abad ke-21 yang menuntut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi..

Keberhasilan MGMP sangat dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas pendukung, seperti ruang pertemuan yang memadai, perangkat teknologi (laptop, LCD proyektor, printer), akses internet yang stabil, serta ketersediaan bahan ajar dan referensi pendidikan. Robbins (2006: 59–61) menyatakan bahwa organisasi dengan dukungan sumber daya yang memadai cenderung lebih efektif dalam melaksanakan program kerja karena memungkinkan koordinasi, komunikasi, dan produktivitas berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana yang lengkap memungkinkan kegiatan MGMP, seperti pelatihan, workshop, diskusi profesional, maupun penyusunan perangkat ajar, dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pengembangan profesional guru.

e. Program dan Perencanaan MGMP yang Jelas

Fullan (2007: 65–67) menekankan bahwa keberhasilan program peningkatan kompetensi dan perubahan pendidikan sangat ditentukan oleh adanya perencanaan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan, bukan kegiatan yang bersifat insidental atau reaktif. Perencanaan yang baik memungkinkan program pengembangan profesional memiliki kejelasan tujuan, arah perubahan, serta mekanisme pengendalian yang berkelanjutan.

Dalam konteks Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), keberhasilan kegiatan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan program kerja yang mencakup penetapan tujuan yang jelas, penyusunan jadwal kegiatan yang realistis, perumusan indikator keberhasilan, serta pembagian tugas dan peran antaranggota. Fullan (2007: 68–70) menegaskan bahwa perubahan dan peningkatan kompetensi

hanya akan berdampak apabila dirancang sebagai proses jangka panjang yang terintegrasi dengan kebutuhan praktis pelaku Pendidikan.

Perencanaan MGMP yang baik tercermin pada tersusunnya program tahunan, agenda pertemuan berkala, serta kegiatan yang relevan dengan kebutuhan guru, seperti penyusunan perangkat pembelajaran, workshop inovasi pembelajaran, dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK). Sebaliknya, MGMP yang tidak memiliki perencanaan yang jelas berpotensi hanya menjadi forum pertemuan rutin tanpa arah dan tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Hal ini sejalan dengan pandangan Fullan (2007: 71–73) yang menyatakan bahwa ketiadaan perencanaan strategis akan menghambat terjadinya perubahan bermakna dalam praktik pendidikan.

f. Relevansi Materi dan Kebutuhan Guru

Shulman (1986: 9–11) melalui teori *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) menegaskan bahwa pengembangan profesional guru harus berangkat dari keterpaduan antara penguasaan materi ajar (*content knowledge*) dan kemampuan pedagogik dalam menyampaikannya kepada peserta didik. Shulman menekankan bahwa pengembangan profesional yang efektif harus relevan dengan konteks pembelajaran nyata yang dihadapi guru di kelas, bukan semata-mata bersifat teoritis. Oleh karena itu, keberhasilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sangat bergantung pada kesesuaian materi yang dibahas dengan tantangan akademik dan kebutuhan pembelajaran yang dihadapi guru.

Faktor relevansi ini tercermin dari materi MGMP yang mengacu pada kurikulum terbaru, menjawab permasalahan implementasi pembelajaran di kelas,

serta memberikan ruang bagi guru untuk melakukan praktik langsung, seperti simulasi pembelajaran, penyusunan perangkat ajar, dan diskusi kasus pembelajaran. Shulman (1986: 12–14) menegaskan bahwa pembelajaran profesional yang mengintegrasikan teori dan praktik akan lebih bermakna dan mudah diterapkan dalam konteks kelas. Ketika materi MGMP sesuai dengan kebutuhan nyata guru, maka motivasi dan keterlibatan guru akan meningkat, serta hasil MGMP lebih berpeluang diimplementasikan secara efektif dalam pembelajaran.

Selain Shulman, Grossman (1990: 8–10) memperluas konsep *Pedagogical Content Knowledge* dengan menegaskan bahwa pengembangan profesional guru akan efektif apabila materi pelatihan secara langsung terhubung dengan praktik pembelajaran di kelas. Grossman menyatakan bahwa PCK berkembang melalui pengalaman reflektif guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai konteks mata pelajaran dan karakteristik peserta didik. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan MGMP perlu berorientasi pada kebutuhan nyata guru, bukan hanya penyampaian teori.

Selanjutnya, Ball, Thames, dan Phelps (2008: 395–398) menekankan bahwa pengembangan kompetensi guru harus berfokus pada *knowledge for teaching*, yaitu pengetahuan yang secara langsung digunakan dalam praktik mengajar. Mereka menjelaskan bahwa pelatihan guru yang relevan adalah pelatihan yang memungkinkan guru menganalisis kesulitan siswa, memilih strategi pembelajaran yang tepat, serta mengaitkan konten dengan pedagogi secara kontekstual. Dalam

MGMP, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui diskusi kasus pembelajaran, praktik penyusunan perangkat ajar, dan simulasi pembelajaran.

Selain itu, Desimone (2009: 184–186) menegaskan bahwa salah satu karakteristik utama pengembangan profesional guru yang efektif adalah *content focus*, yaitu kesesuaian materi pelatihan dengan mata pelajaran dan kebutuhan pembelajaran guru. Desimone menyatakan bahwa kegiatan pengembangan profesional yang relevan secara konten lebih berdampak pada perubahan praktik mengajar dibandingkan pelatihan yang bersifat umum. Pandangan ini memperkuat posisi MGMP sebagai forum strategis karena berbasis mata pelajaran dan berorientasi pada kebutuhan spesifik guru.

Dengan demikian, teori Shulman tentang PCK diperkuat oleh Grossman, Ball *et al.*, dan Desimone yang sama-sama menegaskan bahwa relevansi materi, keterkaitan dengan praktik kelas, dan fokus pada kebutuhan guru merupakan kunci keberhasilan pengembangan profesional. Dalam konteks MGMP, kesesuaian materi dengan tantangan pembelajaran akan meningkatkan motivasi guru, memperkuat keterlibatan, serta memudahkan implementasi hasil MGMP dalam pembelajaran di kelas.

g. Kultur Kolaboratif antar Guru

Menurut DuFour (2004: 8–11), komunitas pembelajaran profesional (*Professional Learning Community/PLC*) yang efektif dibangun di atas budaya saling percaya, kolaborasi, dan refleksi bersama. DuFour menegaskan bahwa guru perlu bekerja dalam komunitas yang memungkinkan mereka berbagi praktik, saling memberi umpan balik, serta secara kolektif bertanggung jawab terhadap

peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik . Dalam konteks Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), forum ini seharusnya menjadi ruang profesional yang mendukung guru untuk saling belajar, berbagi pengalaman, menerima masukan, dan bekerja sama secara berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pengajaran.

Budaya kolaboratif dalam MGMP tercermin melalui diskusi yang terbuka dan setara, kerja tim dalam penyusunan perangkat ajar, kesiapan menerima kritik konstruktif, serta komitmen untuk terus belajar bersama. DuFour dan Eaker (1998: 25–28) menegaskan bahwa kultur kolaboratif mendorong pergeseran pola kerja guru dari praktik individual menuju kerja tim profesional yang sistematis dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi yang kuat, guru tidak hanya berbagi materi, tetapi juga berbagi tanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Hord (1997: 12–14) yang menyatakan bahwa komunitas pembelajaran profesional yang efektif ditandai oleh adanya visi bersama, pembelajaran kolektif, praktik reflektif, dan dukungan interpersonal antaranggota. Dalam MGMP, unsur-unsur ini tampak pada kegiatan refleksi pembelajaran, diskusi permasalahan kelas, serta perencanaan pembelajaran secara kolaboratif. Selain itu, Stoll *et al.* (2006: 223–225) menegaskan bahwa budaya kolaboratif dalam komunitas guru berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas profesional dan inovasi pembelajaran.

Dengan demikian, teori DuFour yang diperkuat oleh DuFour dan Eaker, Hord, serta Stoll *et al.* menunjukkan bahwa MGMP akan berfungsi optimal apabila

dikembangkan sebagai komunitas pembelajaran profesional yang menjunjung tinggi budaya kolaboratif, reflektif, dan saling percaya. Kultur kolaboratif tersebut mendorong guru keluar dari pola kerja individual menuju komunitas profesional yang produktif, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan pembelajaran.

h. Ketersediaan Narasumber dan Pendampingan Profesional

Pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) menurut Knowles (1980 : 43–45) menegaskan bahwa orang dewasa belajar secara lebih efektif ketika pembelajaran bersifat relevan dengan kebutuhan nyata, berorientasi pada pemecahan masalah, serta difasilitasi oleh individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai. Knowles menjelaskan bahwa peran fasilitator atau narasumber ahli sangat penting dalam membantu pembelajar dewasa mengaitkan pengalaman sebelumnya dengan pengetahuan baru. Oleh karena itu, keberadaan narasumber dan pendamping profesional dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) menjadi faktor strategis dalam memperluas wawasan guru, memberikan bimbingan teknis, serta mendukung penerapan inovasi pembelajaran.

Dalam konteks MGMP, narasumber dapat berasal dari perguruan tinggi, praktisi pendidikan, pengawas sekolah, fasilitator sekolah penggerak atau pusat keunggulan, maupun mentor penelitian. Knowles *et al.* (2015: 64–67) menegaskan bahwa pembelajaran orang dewasa akan lebih bermakna apabila peserta didik dewasa mendapatkan fasilitasi dari ahli yang mampu berperan sebagai *learning partner*, bukan sekadar penyampai materi. Pendamping profesional membantu guru memahami konsep baru, mempraktikkannya secara kontekstual, serta merefleksikan penerapannya dalam pembelajaran.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Merriam dan Bierema (2014: 33–36) yang menyatakan bahwa pembelajaran orang dewasa yang efektif membutuhkan pendampingan ahli untuk mendorong refleksi kritis, penguatan kompetensi profesional, dan transfer pembelajaran ke praktik kerja . Dalam MGMP, pendampingan yang tepat akan meningkatkan kualitas diskusi, efektivitas pelatihan, serta kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kebijakan kurikulum dan metodologi pembelajaran. Dengan demikian, keberadaan narasumber dan pendamping profesional menjadi unsur penting dalam menjamin keberhasilan MGMP sebagai komunitas pembelajaran guru yang berkelanjutan

i. Pendanaan yang Memadai

Pendanaan merupakan faktor administratif yang tidak dapat diabaikan dalam keberhasilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 39 Tahun 2009 (Pasal 4 dan Pasal 6) tentang Pembinaan Guru menegaskan bahwa organisasi profesi guru memerlukan dukungan pendanaan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pembinaan dan pengembangan profesional guru, termasuk pembiayaan kegiatan, transportasi, konsumsi, alat tulis kantor, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan MGMP, pendanaan menjadi prasyarat penting agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal. Daryanto (2013: 83–85) menyatakan bahwa keberhasilan kegiatan MGMP sangat dipengaruhi oleh dukungan administratif, termasuk ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pelatihan, workshop, serta pengembangan

perangkat pembelajaran. Tanpa dukungan dana, MGMP berpotensi hanya menjadi forum pertemuan rutin yang terbatas pada diskusi tanpa tindak lanjut yang nyata.

Pendanaan MGMP dapat bersumber dari pemerintah daerah, alokasi dana sekolah seperti BOS (sesuai ketentuan yang berlaku), hibah pendidikan, maupun kerja sama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi. Robbins (2006: 56–58) menegaskan bahwa kecukupan sumber daya finansial merupakan salah satu determinan utama efektivitas organisasi, karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran program kerja dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam MGMP, ketersediaan dana memungkinkan terselenggaranya kegiatan secara terencana, terjadwal, dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Hoy dan Miskel (2013: 189–191) yang menyatakan bahwa organisasi pendidikan yang memiliki dukungan sumber daya keuangan yang memadai cenderung lebih stabil, adaptif, dan efektif dalam menjalankan program pengembangan profesional anggotanya. Dengan demikian, pendanaan bukan hanya faktor pendukung teknis, tetapi merupakan elemen strategis yang menentukan keberhasilan MGMP dalam meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

2.1.2 Kompetensi Profesional Guru

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai substansi keilmuan mata

pelajaran yang diampu, memahami struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya, serta mampu mengaplikasikan penguasaan tersebut secara tepat dalam proses pembelajaran. Penguasaan keilmuan yang memadai menjadi dasar bagi guru dalam membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 (Pasal 10 Ayat 1) tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang menyatakan bahwa kompetensi profesional meliputi penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta kemampuan mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Sejalan dengan regulasi tersebut, Mulyasa (2013: 135–137) menyatakan bahwa kompetensi profesional guru mencakup kemampuan menguasai bahan ajar secara mendalam, mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif, serta memanfaatkan berbagai sumber belajar dan teknologi untuk mendukung

pembelajaran yang efektif dan bermakna. Guru profesional tidak hanya memahami isi materi, tetapi juga mampu mengelolanya agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan kurikulum. Pandangan ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional bersifat dinamis dan menuntut pengembangan kemampuan akademik dan praktik pembelajaran secara berkelanjutan.

Kunandar (2014: 76–78) menegaskan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan guru terhadap bidang studi yang diampu, termasuk pemahaman konsep, metode keilmuan, serta keterkaitannya dengan konteks kehidupan nyata. Guru profesional dituntut mampu menyajikan materi secara sistematis, logis, dan kontekstual sehingga pembelajaran tidak bersifat abstrak, tetapi relevan dengan pengalaman peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan PP Nomor 16 Tahun 2007 yang menekankan kemampuan guru dalam mentransformasikan substansi keilmuan ke dalam pembelajaran yang bermakna.

Sudjana (2010: 19–21) menegaskan bahwa kompetensi profesional guru mencakup penguasaan materi pembelajaran secara konseptual, struktural, dan aplikatif. Penguasaan konseptual berkaitan dengan pemahaman guru terhadap konsep-konsep dasar keilmuan yang menjadi fondasi mata pelajaran, sehingga guru tidak sekadar menghafal materi, tetapi memahami makna dan hakikatnya. Penguasaan struktural merujuk pada kemampuan guru dalam memahami keterkaitan antarkonsep secara sistematis dan logis, sehingga materi pembelajaran

dapat disajikan secara runtut dan koheren. Sementara itu, penguasaan aplikatif menekankan kemampuan guru dalam menerapkan konsep dan struktur keilmuan tersebut ke dalam situasi pembelajaran nyata, baik melalui pemilihan metode, strategi, maupun kegiatan pembelajaran yang relevan dengan konteks peserta didik. Dengan demikian, kompetensi profesional guru tidak hanya menekankan aspek kognitif semata, tetapi juga kemampuan mentransformasikan pengetahuan keilmuan menjadi pengalaman belajar yang bermakna.

Dalam perspektif perubahan pendidikan, Fullan memandang profesionalisme guru sebagai proses berkelanjutan yang menuntut guru untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbarui praktik pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum, perkembangan pendidikan, serta kebutuhan peserta didik (Fullan, 1991: 117–120). Guru profesional diposisikan sebagai agen perubahan yang secara reflektif mampu merespons dinamika pendidikan melalui pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pedagogis secara terus-menerus. Pandangan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa kompetensi profesional guru tidak hanya mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, tetapi juga pengembangan keilmuan dan praktik pembelajaran secara berkesinambungan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional guru.

Dalam konteks kompetensi profesional guru seni, Efland (2002: 89–92). menegaskan bahwa profesionalisme guru seni tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis berkarya, tetapi juga oleh penguasaan pengetahuan konseptual, historis, kritis, dan estetis seni. Guru seni yang profesional mampu memahami seni

sebagai disiplin ilmu yang utuh dan mentransformasikannya ke dalam pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Efland (2002: 101–104; 110–112). juga menekankan pentingnya integrasi praktik berkarya, sejarah seni, kritik seni, dan estetika dalam pembelajaran. Integrasi keempat domain tersebut mencerminkan kompetensi profesional guru seni dalam merancang pengalaman belajar yang mendorong pemikiran kritis, reflektif, dan kreatif, serta mengaitkan seni dengan konteks sosial dan budaya peserta didik.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli dan ketentuan regulasi, kompetensi profesional guru dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam menguasai keilmuan mata pelajaran secara mendalam, sistematis, dan terstruktur, disertai kecakapan mengembangkan serta menerapkan materi pembelajaran secara kreatif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kompetensi ini juga menuntut komitmen guru terhadap pengembangan diri secara berkelanjutan melalui refleksi, pembaruan keilmuan, dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Dalam konteks guru seni, kompetensi profesional tersebut memiliki kekhasan, yakni mencakup penguasaan keterampilan artistik sekaligus pemahaman konseptual, historis, kritis, dan estetis seni. Guru seni yang profesional tidak hanya berfokus pada hasil karya, tetapi juga pada proses pemaknaan, apresiasi, dan refleksi estetis peserta didik, sehingga pembelajaran seni berfungsi sebagai wahana pengembangan kreativitas, berpikir kritis, dan kesadaran budaya

Untuk memperjelas persamaan dan perbedaan penekanan konsep kompetensi profesional guru menurut para ahli dan regulasi, ringkasan perbandingan pandangan tersebut disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pandangan Ahli Mengenai Kompetensi Professional Guru

No	Ahli	Fokus Utama Pandangan	Inti Konsep Kompetensi Profesional	Relevansi dengan Guru Seni Budaya
1	Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 (Pasal 10 ayat [1])	Penguasaan materi pembelajaran	Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi	Guru Seni Budaya dituntut menguasai teori seni, praktik berkesenian, dan standar kompetensi mata pelajaran
2	Mulyasa, E. (2013: 135–137)	Penguasaan materi dan kreativitas pengembangan	Kompetensi profesional mencakup penguasaan bahan ajar, pengembangan materi secara kreatif, serta pemanfaatan sumber dan teknologi belajar	Menuntut guru Seni Budaya kreatif mengembangkan materi dan media pembelajaran berbasis praktik
3	Kunandar (2014: 55–58)	Penguasaan bidang studi dan kontekstualisasi	Kompetensi profesional adalah penguasaan konsep, metode keilmuan, serta keterkaitan materi dengan kehidupan nyata	Pembelajaran Seni Budaya perlu dikaitkan dengan budaya lokal dan pengalaman peserta didik
4	Sudjana, N. (2010: 17–19)	Penguasaan konseptual, struktural, dan aplikatif	Guru profesional harus menguasai materi secara konseptual, struktural, dan aplikatif agar pembelajaran bermakna	Guru Seni Budaya harus mampu menjelaskan konsep seni dan membimbing praktik berkarya
5	Fullan, M. (1991: 67–69)	Pengembangan profesional berkelanjutan	Profesionalisme guru mencakup kemampuan refleksi, adaptasi, dan pembaruan praktik pembelajaran secara berkelanjutan	Guru Seni Budaya perlu terus mengembangkan kompetensi sesuai dinamika kurikulum

6	Permendiknas No. 16 Tahun 2007 (Lampiran)	Standar kompetensi profesional guru	Indikator kompetensi profesional meliputi penguasaan materi, pengembangan kreatif, refleksi berkelanjutan, dan pemanfaatan TIK	Menjadi acuan formal kompetensi profesional guru Seni Budaya
7	Efland (2002: 89–92; 101–104)	Seni sebagai disiplin ilmu	Kompetensi profesional guru seni mencakup penguasaan pengetahuan konseptual, historis, kritis, dan estetis seni serta kemampuan mengintegrasikan praktik berkarya, sejarah seni, kritik seni, dan estetika dalam pembelajaran yang bermakna	Menjadi dasar bagi Guru Seni Budaya dalam mengembangkan pembelajaran seni yang utuh, bermakna, dan kontekstual

2.1.2.2 Indikator Kompetensi Profesional Guru

Berdasarkan kajian terhadap regulasi dan pandangan para ahli, indikator kompetensi profesional guru dalam penelitian ini dirumuskan dengan mengacu pada penekanan masing-masing sumber teori. Perumusan indikator ini dimaksudkan untuk memperjelas dimensi kompetensi profesional guru secara operasional, sekaligus menjaga kesesuaian antara landasan teoretis dan fokus penelitian. Adapun indikator kompetensi profesional guru menurut masing-masing ahli dan regulasi adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Indikator kompetensi profesional guru menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 menekankan aspek penguasaan keilmuan sebagai dasar pelaksanaan tugas profesional, yang meliputi:

- penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam;

- kemampuan membimbing peserta didik untuk mencapai standar kompetensi;
- penguasaan keilmuan mata pelajaran sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2007, kompetensi profesional guru tercermin melalui kemampuan penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran, yang ditunjukkan oleh indikator berikut:

- penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan mata pelajaran;
- penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
- kemampuan mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif;
- kemampuan menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan peserta didik.

3. Mulyasa (2013: 135-137)

Mulyasa memandang kompetensi profesional guru sebagai kemampuan dinamis yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan materi pembelajaran. Indikator kompetensi profesional guru menurut Mulyasa meliputi:

- penguasaan bahan ajar secara mendalam;
- kemampuan mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif;
- kemampuan memanfaatkan berbagai sumber belajar;
- kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran;

- kemampuan menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta didik dan kurikulum.

4. Kunandar (2014:76-78)

Menurut Kunandar, kompetensi profesional guru tercermin dari penguasaan bidang studi dan kemampuan menyajikannya secara bermakna. Indikator yang dikemukakan meliputi:

- penguasaan bidang studi yang diampu;
- pemahaman konsep dan metode keilmuan;
- kemampuan menyajikan materi secara sistematis dan logis;
- kemampuan mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata;
- kemampuan mentransformasikan substansi keilmuan ke dalam pembelajaran bermakna.

5. Sudjana (2013: 19-21)

Sudjana menekankan bahwa kompetensi profesional guru mencakup penguasaan materi secara menyeluruh, baik secara konseptual, struktural, maupun aplikatif. Indikator kompetensi profesional guru menurut Sudjana meliputi:

- penguasaan materi pembelajaran secara konseptual;
- penguasaan struktur keilmuan mata pelajaran;
- pemahaman keterkaitan antarkonsep secara sistematis;
- kemampuan menerapkan konsep keilmuan dalam pembelajaran;
- kemampuan menyajikan materi secara runtut dan koheren.

6. Fullan (1991: 117-120)

Dalam perspektif perubahan pendidikan, Fullan memandang kompetensi profesional guru sebagai proses berkelanjutan. Indikator kompetensi profesional guru menurut Fullan meliputi:

- komitmen terhadap pengembangan profesional berkelanjutan;
- kemampuan reflektif terhadap praktik pembelajaran;
- kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan;
- peran guru sebagai agen perubahan dalam pembelajaran;
- kemampuan memperbarui pengetahuan dan praktik pembelajaran secara berkesinambungan.

7. Efland (2002: 89-92, 101-104, 110-112) – Konteks Guru Seni

Dalam konteks pendidikan seni, Efland menegaskan bahwa kompetensi profesional guru seni memiliki kekhasan yang melampaui keterampilan teknis.

Indikator kompetensi profesional guru seni menurut Efland meliputi:

- penguasaan keterampilan artistik sesuai bidang seni yang diampu;
- penguasaan pengetahuan konseptual seni;
- penguasaan pengetahuan historis seni;
- penguasaan pengetahuan kritis dan estetis seni;
- kemampuan mengintegrasikan praktik berkarya, sejarah seni, kritik seni, dan estetika dalam pembelajaran;
- kemampuan merancang pembelajaran seni yang reflektif dan kreatif;
- kemampuan mengaitkan pembelajaran seni dengan konteks sosial dan budaya.

Berdasarkan ketentuan regulasi dan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kompetensi profesional guru mencakup penguasaan keilmuan mata pelajaran secara luas, mendalam, dan terstruktur; kemampuan mentransformasikan substansi keilmuan ke dalam pembelajaran yang sistematis, kreatif, dan kontekstual; pemanfaatan sumber belajar dan teknologi; serta komitmen terhadap pengembangan profesional berkelanjutan. Dalam konteks guru seni, indikator tersebut diperkaya dengan penguasaan keterampilan artistik serta pemahaman konseptual, historis, kritis, dan estetis seni, sehingga pembelajaran seni tidak hanya berorientasi pada hasil karya, tetapi juga pada proses pemaknaan, refleksi, dan penguatan nilai budaya peserta didik.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai peran MGMP dalam meningkatkan profesionalisme guru telah banyak dilakukan pada berbagai mata pelajaran. Beberapa artikel Jurnal dan tesis berikut memberikan landasan empiris dan relevansi bagi penelitian ini:

1. Sumiyani, S. (2023)

The Impact of Teacher's Involvement in MGMP on the Teachers' Performance. PPSDP International Journal of Education, 2(2), 444–448.

Penelitian Sumiyani (2023) sangat relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menelaah kontribusi MGMP terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Melalui temuannya, Sumiyani menunjukkan bahwa keterlibatan aktif guru dalam MGMP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan praktik mengajar, kemampuan menyusun perangkat pembelajaran, serta efektivitas evaluasi pembelajaran. Hasil ini mendukung kerangka teoretis penelitian ini yang

memandang MGMP sebagai komunitas belajar profesional yang mampu mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional guru secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian Sumiyani menjadi dasar empiris yang memperkuat argumentasi bahwa MGMP berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus menjadi studi pembanding bagi penelitian ini.

2. Fatmawati, Hasbi, dan Nurdin K. (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, Hasbi, dan Nurdin K. dari Program Pascasarjana IAIN Palopo berjudul *“Dampak Implementasi Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS terhadap Profesionalitas Guru SMP Negeri di Palopo”* merupakan salah satu rujukan penting yang memiliki keterkaitan kuat dengan penelitian ini. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana implementasi manajemen MGMP berpengaruh terhadap peningkatan profesionalitas guru IPS pada sekolah-sekolah negeri di Kota Palopo.

Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber datanya melibatkan ketua MGMP, pengawas, staf MGMP, beberapa guru IPS, serta dokumen resmi seperti perangkat pembelajaran dan administrasi MGMP. Analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen MGMP membawa dampak positif terhadap peningkatan profesionalitas guru, terutama dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan, antara lain kedisiplinan

peserta MGMP yang masih rendah, keterlibatan narasumber ahli yang belum optimal, serta keterbatasan pendanaan yang menghambat pelaksanaan kegiatan secara maksimal. Para peneliti menawarkan beberapa solusi, seperti perlunya konsolidasi antara pengurus MGMP dengan MKKS, peningkatan kerja sama dengan pakar atau praktisi pendidikan, serta penggalangan dana untuk mendukung keberlanjutan kegiatan MGMP.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama menelaah peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Temuan mengenai dampak implementasi manajemen MGMP memberikan landasan empiris yang kuat bagi penelitian ini, khususnya terkait efektivitas program MGMP, dinamika pelaksanaannya, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan peningkatan kualitas guru. Selain itu, penelitian ini memperkuat asumsi bahwa MGMP merupakan wadah strategis dalam pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*) bagi guru mata pelajaran, termasuk guru IPS.

3. Andwian Ody Prayoga, dkk (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Purnomo berjudul “*Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran dalam Program Merdeka Belajar pada SMP di Kabupaten Semarang*” memberikan kontribusi penting sebagai rujukan dalam mengkaji peran MGMP terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana MGMP berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Merdeka Belajar, khususnya pada mata pelajaran IPS di tingkat SMP.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggambarkan bagaimana MGMP berfungsi sebagai wadah bagi guru untuk memperoleh pemahaman, pelatihan, dan penguatan kompetensi dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru IPS di Kabupaten Semarang memiliki persepsi positif terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. Hal ini tidak lepas dari peran aktif MGMP IPS yang secara konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, seperti *workshop* Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), penyusunan modul ajar IPS, serta kegiatan kolaboratif lainnya yang mendukung kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka.

Kegiatan MGMP terbukti mampu meningkatkan pengetahuan guru mengenai konsep, prinsip, dan praktik Kurikulum Merdeka, sekaligus menciptakan ruang kolaboratif bagi guru untuk berbagi pengalaman, memecahkan masalah pembelajaran, serta mengembangkan bahan ajar secara mandiri maupun kelompok. Selain itu, implementasi program MGMP juga berjalan efektif karena mendapat partisipasi yang luas dari guru IPS dan tersosialisasi dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena menguatkan pandangan bahwa MGMP memiliki peranan strategis dalam meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru, terutama dalam konteks Kurikulum Merdeka. Temuan tersebut mendukung kerangka teori bahwa MGMP merupakan bagian dari komunitas belajar profesional (*Professional Learning Community*) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kompetensi

berkelanjutan bagi guru. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai aktivitas MGMP IPS, bentuk program yang dijalankan, serta kontribusi nyata yang diberikan terhadap kualitas pendidikan di tingkat SMP.

4. Irnawati (2017)

Penelitian yang berjudul “*Pengelolaan MGMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Seni Budaya Sma Di Kota Cimahi*” dilakukan oleh Irnawati (2017) memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dikelola sebagai wadah profesional untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya pada mata pelajaran Seni Budaya. Dalam penelitiannya, Irnawati menegaskan bahwa MGMP bukan hanya forum administratif, tetapi merupakan komunitas belajar profesional (*professional learning community*) yang berfungsi mengembangkan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru Seni Budaya.

Irnawati (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan MGMP yang efektif mencakup beberapa aspek utama:

1. Perencanaan program yang sistematis, mencakup analisis kebutuhan guru, perumusan tujuan kegiatan, dan penyusunan agenda kerja yang relevan dengan pengembangan kompetensi profesional.
2. Pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran Seni Budaya, seperti *workshop* penyusunan perangkat pembelajaran, pelatihan teknik dan media seni, diskusi kurikulum, serta berbagi praktik baik antar guru.

3. Evaluasi program MGMP, yang dilakukan melalui refleksi bersama untuk menilai capaian kegiatan, hambatan yang dihadapi, serta tindak lanjut untuk perbaikan program pada periode berikutnya.

Salah satu temuan penting Irnawati adalah bahwa keaktifan guru dalam mengikuti kegiatan MGMP berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi profesional mereka. MGMP terbukti berperan dalam memperluas wawasan guru mengenai strategi pembelajaran Seni Budaya, inovasi media ajar, hingga adaptasi terhadap perubahan kurikulum. Irnawati menekankan bahwa kegiatan kolaboratif seperti *lesson study*, lokakarya (*workshop*), dan pendampingan antar guru memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran di kelas.

Selain itu, Irnawati (2017) juga menggarisbawahi pentingnya dukungan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan dalam menjaga keberlangsungan MGMP. Dukungan tersebut dapat berupa fasilitas, pembiayaan kegiatan, hingga kebijakan waktu yang memberi ruang bagi guru untuk mengikuti pertemuan MGMP secara rutin.

Dari hasil penelitiannya, Irnawati menyimpulkan bahwa pengelolaan MGMP yang baik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Seni Budaya, karena forum tersebut mampu memberikan pengalaman belajar berkelanjutan, ruang kolaborasi, dan penguatan kompetensi sesuai kebutuhan guru. Secara praktis, MGMP menjadi sarana yang efektif untuk memecahkan masalah pembelajaran, mengevaluasi metode pengajaran, serta mengembangkan kreativitas guru Seni Budaya dalam merancang pembelajaran yang lebih inovatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Irnawati (2017) sangat relevan dengan penelitian ini karena keduanya sama-sama mengkaji peran dan pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah peningkatan kompetensi profesional guru. Meskipun konteks penelitian Irnawati berada pada MGMP Seni Budaya tingkat SMA di Kota Cimahi, sementara penelitian ini berfokus pada MGMP Seni Budaya tingkat SMP, namun karakteristik dan fungsi dasar MGMP sebagai komunitas belajar profesional tetap bersifat universal dan dapat dibandingkan.

Pertama, Irnawati (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan MGMP yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Temuan ini menjadi landasan teoretis bagi penelitian ini dalam melihat peran MGMP Seni Budaya di SMP, khususnya pada penguatan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Kedua, Irnawati menekankan bahwa kegiatan MGMP yang efektif meliputi workshop, pelatihan teknik berkarya, diskusi kurikulum, refleksi pembelajaran, dan lesson study, yang menjadi acuan empiris dalam menilai bentuk kegiatan MGMP di lokasi penelitian. Ketiga, penelitian Irnawati juga mengungkap pentingnya dukungan kelembagaan, seperti peran kepala sekolah dan dinas pendidikan dalam penyediaan fasilitas, pendanaan, dan kebijakan teknis yang menunjang keberlangsungan MGMP. Keempat, penelitian tersebut menyoroti tantangan berupa rendahnya partisipasi guru dan keterbatasan sumber daya sebagai hambatan dalam pengelolaan MGMP.

Dengan demikian, penelitian Irnawati (2017) menjadi rujukan penting yang memperkuat analisis penelitian ini bahwa MGMP merupakan instrumen strategis

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Seni Budaya secara sistematis dan kolaboratif.

5. Eko Widayani, Siti Maizul Habibah (2024)

Eko Widayani, Siti Maizul Habibah (2024) melalui artikel pengabdian kepada masyarakat berjudul “*Pelatihan Platform Merdeka Mengajar untuk MGMP Seni Budaya*” menyoroti pentingnya penguatan kapasitas guru Seni Budaya dalam menghadapi tuntutan Kurikulum Merdeka. Kegiatan pengabdian ini berfokus pada pendampingan guru-guru yang tergabung dalam MGMP Seni Budaya agar mampu memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) secara optimal, khususnya pada fitur-fitur yang berkaitan dengan perangkat ajar, asesmen, komunitas belajar, serta pengembangan kompetensi profesional.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan PMM berdampak positif terhadap peningkatan literasi digital guru dan pemahaman implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam pemanfaatan modul ajar, capaian pembelajaran, video pembelajaran, dan fitur refleksi. Selain itu, MGMP terbukti berperan strategis sebagai wadah berbagi praktik baik, diskusi, dan kolaborasi antarguru dalam merespons dinamika kurikulum, sehingga menegaskan MGMP sebagai pusat pengembangan profesional berbasis teknologi, bukan sekadar forum koordinasi.

Penelitian Caraka (2024) relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan MGMP sebagai elemen strategis dalam peningkatan kompetensi guru pada konteks Kurikulum Merdeka. Caraka menegaskan bahwa penguatan profesionalisme guru dipengaruhi oleh pelatihan, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang sejalan dengan fokus

penelitian ini terhadap peran MGMP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur dan aktivitas MGMP berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh keberfungsian komunitas belajar guru. Oleh karena itu, penelitian Caraka menjadi pembanding empiris yang memperkuat landasan penelitian ini, sebagaimana diringkas dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu Tentang MGMP

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Implikasi untuk Penelitian Ini
1	Sumiyani, S.	2023	<i>The Impact of Teacher's Involvement in MGMP on the Teachers' Performance</i>	Keterlibatan aktif guru dalam MGMP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja guru, kemampuan menyusun perangkat ajar, kualitas pengajaran, serta kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran. MGMP berfungsi efektif sebagai komunitas belajar profesional.	Temuan ini memperkuat asumsi bahwa MGMP memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan profesionalisme guru. Penelitian ini mengambil relevansi terutama pada aspek keaktifan guru, kolaborasi, dan dampaknya pada kompetensi pedagogik dan profesional guru Seni Budaya.
2	Fatmawati, Hasbi & Nurdin K.	2020	<i>Dampak Implementasi Manajemen MGMP IPS terhadap Profesionalitas Guru SMP Negeri di Palopo</i>	Implementasi manajemen MGMP berdampak positif terhadap kompetensi pedagogik dan profesional guru IPS. Hambatan utama meliputi kedisiplinan peserta, kurangnya narasumber ahli, serta keterbatasan dana. Perlu konsolidasi MGMP–MKKS serta dukungan pendanaan.	Memberi gambaran empiris mengenai faktor pendukung dan penghambat keberhasilan MGMP. Relevan untuk menilai tata kelola MGMP Seni Budaya di SMP serta mengidentifikasi faktor manajerial yang

					memengaruhi kualitas kegiatan MGMP.
3	Prayoga & Purnomo	2023	<i>Peran MGMP dalam Program Merdeka Belajar pada SMP di Kabupaten Semarang</i>	MGMP IPS berperan penting dalam penguatan kompetensi guru melalui workshop IKM, penyusunan modul ajar, dan kolaborasi. Guru memiliki persepsi positif terhadap Kurikulum Merdeka karena dukungan MGMP yang aktif.	Relevan dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka pada MGMP Seni Budaya. Memberikan contoh konkret bentuk kegiatan MGMP yang efektif untuk peningkatan Kompetensi Guru.
4	Irnowati, N.	2017	<i>Pengelolaan MGMP dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Seni Budaya SMA di Kota Cimahi</i>	Pengelolaan MGMP yang efektif mencakup perencanaan program, pelaksanaan kegiatan berbasis pelatihan, lesson study, diskusi kurikulum, serta evaluasi program. Keaktifan guru sangat menentukan peningkatan kompetensi profesional. Didukung oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan.	Walaupun konteksnya SMA, penelitian ini sangat relevan karena membahas MGMP Seni Budaya. Memberikan acuan mengenai pengelolaan, bentuk kegiatan, dan faktor pendukung MGMP yang dapat dibandingkan dengan situasi MGMP Seni Budaya SMP di lokasi penelitian.
5	Eko Widayani & Siti Maizul Habibah (Caraka)	2024	<i>Pelatihan Platform Merdeka Mengajar untuk MGMP Seni Budaya</i>	Pelatihan PMM meningkatkan literasi digital guru, pemahaman Kurikulum Merdeka, serta kemampuan menggunakan modul ajar, asesmen, dan fitur refleksi. MGMP menjadi pusat kolaborasi guru untuk berbagi praktik baik dan penguatan profesionalisme berbasis teknologi.	Relevan karena menegaskan MGMP sebagai wadah strategis dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Menguatkan bahwa dukungan teknologi dan pelatihan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam peningkatan profesional guru Seni Budaya.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu—meliputi

Sumiyani (2023), Fatmawati dkk. (2020), Prayoga & Purnomo (2023), Irnowati

(2017), serta Caraka (2024)—dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) memiliki peran sentral sebagai wadah pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*) bagi guru. Meskipun penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada mata pelajaran dan konteks yang berbeda, seluruhnya menunjukkan pola temuan yang konsisten terkait kontribusi MGMP dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.

Pertama, seluruh penelitian sepakat bahwa keterlibatan aktif guru dalam kegiatan MGMP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan pedagogik dan profesional. Temuan Sumiyani (2023) menekankan bahwa MGMP meningkatkan kapasitas guru dalam praktik mengajar, penyusunan perangkat ajar, serta evaluasi pembelajaran. Sementara itu, penelitian Fatmawati dkk. (2020) dan Irnawati (2017) menegaskan bahwa manajemen dan pengelolaan MGMP yang baik—meliputi perencanaan program, pelaksanaan workshop, dan evaluasi kegiatan—berdampak positif pada peningkatan kompetensi guru.

Kedua, sintesis penelitian juga menunjukkan bahwa MGMP berfungsi sebagai komunitas belajar profesional (*Professional Learning Community*) yang memfasilitasi kolaborasi, diskusi reflektif, dan berbagi praktik baik antar guru. Hal ini terlihat jelas dalam penelitian Prayoga & Purnomo (2023) yang menemukan bahwa MGMP mampu meningkatkan kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalui kegiatan workshop IKM, penyusunan modul ajar, serta pendampingan kolaboratif. Temuan tersebut diperkuat oleh Caraka (2024), yang menunjukkan bahwa MGMP juga efektif dalam meningkatkan literasi digital dan penguasaan platform Merdeka Mengajar.

Ketiga, berbagai penelitian terdahulu menyoroti tantangan internal dan eksternal dalam pelaksanaan MGMP, seperti rendahnya partisipasi guru, keterbatasan narasumber ahli, dan minimnya dukungan pendanaan (Fatmawati dkk., 2020; Irnawati :2017). Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut memberikan rekomendasi serupa, yaitu perlunya kolaborasi dengan MKKS, dukungan lembaga pendidikan, serta penguatan manajemen MGMP untuk mempertahankan keberlanjutan program.

Keempat, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa MGMP memiliki fleksibilitas fungsi sesuai konteks kebijakan pendidikan. Pada era Kurikulum Merdeka, MGMP berperan penting dalam membantu guru memahami capaian pembelajaran, menyusun modul ajar, memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar, hingga meningkatkan kreativitas pembelajaran seni (Caraka, 2024; Prayoga & Purnomo, 2023). Pada penelitian sebelumnya seperti Irnawati (2017) dan Fatmawati dkk. (2020), MGMP lebih berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional berbasis kurikulum nasional saat itu.

Secara keseluruhan, sintesis dari lima penelitian menunjukkan bahwa MGMP merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan, diskusi, supervisi sejawat, serta kegiatan kolaboratif yang sistematis. Temuan-temuan tersebut memberikan landasan empiris yang kuat bagi penelitian ini untuk menelaah lebih dalam bagaimana peran MGMP—khususnya MGMP Seni Budaya—berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru di lingkungan pendidikan yang dinamis dan menuntut inovasi berkelanjutan.

2.3 Pendekatan Masalah (Kerangka Berpikir)

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan kerangka *Input–Process–Output–Outcome* (IPOO) untuk menganalisis pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Kerangka IPOO dipilih karena mampu menjelaskan hubungan sistematis antara landasan kebijakan dan teori pendidikan, proses pengelolaan MGMP, hasil langsung kegiatan MGMP, serta dampak peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya.

Pada aspek input, penelitian ini menempatkan MGMP Seni Budaya dalam kerangka regulasi dan landasan teoretis pengembangan profesional guru. Secara normatif, input pengelolaan MGMP bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan kompetensi profesional sebagai salah satu kompetensi utama guru, serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang mengatur standar kompetensi profesional guru. Selain itu, kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) menempatkan MGMP sebagai wahana strategis pembinaan dan peningkatan kompetensi guru secara kolektif.

Secara teoretis, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dipandang sebagai *professional learning community* yang berfungsi sebagai forum kolaboratif guru untuk berbagi praktik pembelajaran, mendiskusikan permasalahan pembelajaran, serta mengembangkan kompetensi profesional secara kolektif. Muslich (2011: 57–59) menjelaskan bahwa MGMP merupakan wadah kegiatan profesional guru yang berorientasi pada pemecahan masalah pembelajaran dan

peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui diskusi, pelatihan, dan kerja sama antarguru. Sejalan dengan itu, Mulyasa (2013: 182–184) menegaskan bahwa MGMP memiliki peran strategis dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan karena memungkinkan guru belajar dari pengalaman sejawat, memperbarui pengetahuan, serta meningkatkan keterampilan pedagogik dan profesional secara sistematis.

Dari perspektif kompetensi profesional, para ahli menekankan bahwa guru profesional harus memiliki penguasaan materi pembelajaran secara mendalam, mampu mengembangkan materi secara kreatif, serta melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Sudjana (2010: 19–21) menyatakan bahwa kompetensi profesional guru tercermin dari penguasaan materi secara konseptual, struktural, dan aplikatif sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat hafalan, tetapi bermakna bagi peserta didik. Kunandar (2014: 76–78) menambahkan bahwa kompetensi profesional menuntut guru menguasai bidang studi yang diampu, memahami metode keilmuan, serta mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Sementara itu, Fullan (1991: 37–39) menekankan bahwa profesionalisme guru juga ditandai oleh kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi terhadap perubahan kurikulum, dan memperbarui praktik pembelajaran secara berkelanjutan.

Aspek *process* dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya sebagai organisasi profesi guru yang berperan strategis dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Kajian pada aspek ini difokuskan pada penerapan fungsi manajemen yang meliputi

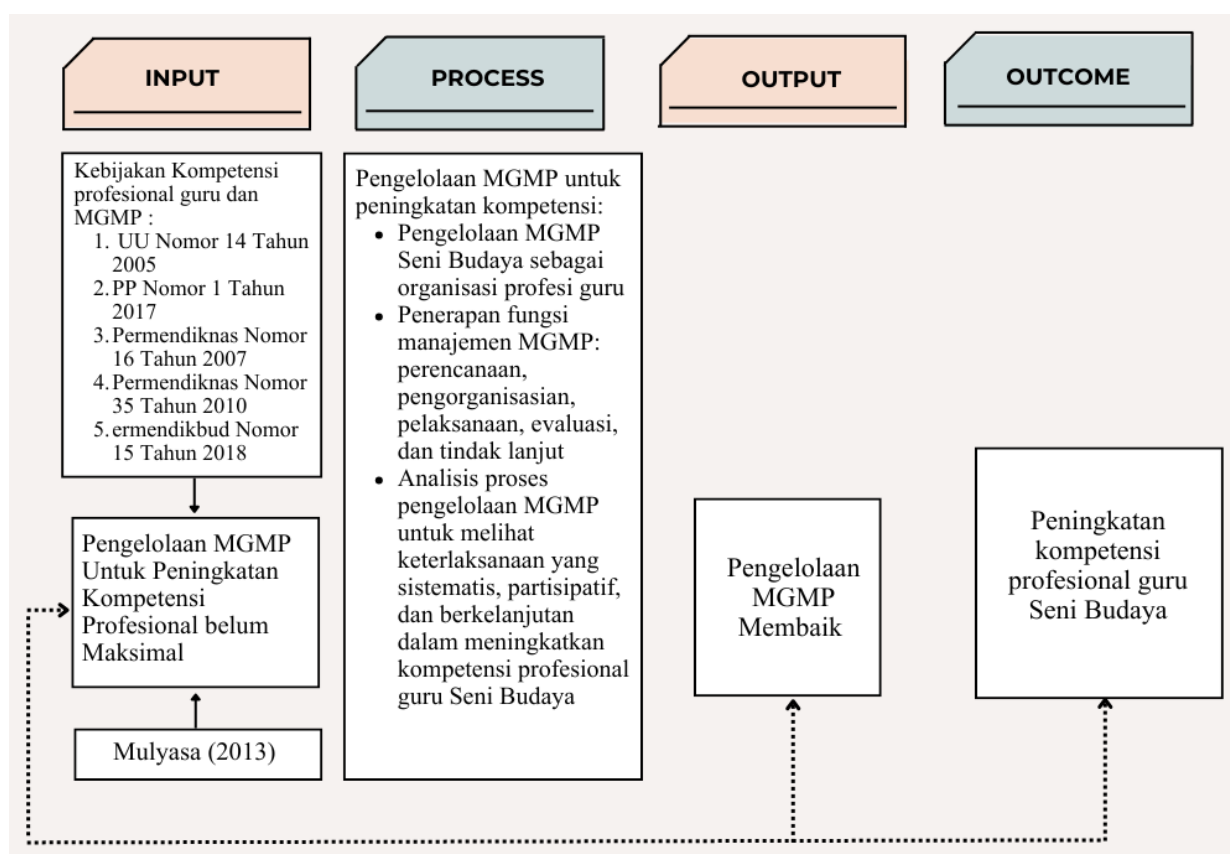
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut kegiatan MGMP. Proses pengelolaan dianalisis untuk mengetahui bagaimana MGMP merancang program berdasarkan kebutuhan kompetensi profesional guru, mengorganisasikan peran dan tanggung jawab pengurus serta anggota, melaksanakan kegiatan pengembangan profesional secara kolaboratif, serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut sebagai upaya perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengelolaan MGMP dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kompetensi profesional guru Seni Budaya.

Pada aspek *output*, penelitian ini mengkaji hasil langsung yang diperoleh dari proses pengelolaan MGMP Seni Budaya. *Output* tersebut meliputi tersusunnya program kerja MGMP yang terarah, perangkat dan modul ajar Seni Budaya yang selaras dengan Kurikulum Merdeka, pengembangan media dan bahan ajar seni, serta meningkatnya pemahaman guru terhadap konsep, strategi, dan kebijakan pembelajaran Seni Budaya. *Output* ini dipandang sebagai indikator awal keberhasilan pengelolaan MGMP dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi profesional guru secara nyata dan aplikatif.

Selanjutnya, aspek *outcome* difokuskan pada dampak jangka menengah dari pengelolaan MGMP Seni Budaya terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Peningkatan tersebut tercermin dalam kemampuan guru merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Seni Budaya yang kreatif, inovatif, dan kontekstual, serta sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. *Outcome* ini menunjukkan bahwa pengelolaan MGMP tidak hanya menghasilkan produk

pembelajaran, tetapi juga berkontribusi pada perubahan praktik pembelajaran guru di kelas secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan IPOO ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan pendidikan, landasan teoretis pengembangan profesional guru, pengelolaan MGMP Seni Budaya, serta peningkatan kompetensi profesional guru secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya pendekatan masalah yang telah diuraikan, kerangka *Input, Process, Output, Outcome* (IPOO) tersebut dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Bagan 2.1
Kerangka *Input, Process, Output, Outcome* (IPOO)